

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi dan industrialisasi saat ini telah membawa dampak yang sangat besar. Pembangunan telah menyentuh hampir semua sisi kehidupan masyarakat. Kecanggihan teknologi membawa kemudahan dalam berbagai bidang. Tentu saja seluruh kemajuan tersebut mempunyai akibat positif yang sangat besar bagi manusia.

Namun prestasi yang begitu tinggi tersebut telah diiringi tekanan-tekanan yang amat dahsyat pada kemampuan daya dukung lingkungan hidup. Pertumbuhan industri di banyak negara telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan baik di darat, air maupun udara yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam petaka lingkungan, seperti hujan asam, suhu bumi yang semakin panas akibat efek rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global, berbagai macam penyakit seperti sesak napas, kanker, paru-paru, penyakit kulit dan lain-lain (Absori, 1999:1).

There is no doubt that achieving economic development in developing countries can only advance reduction of poverty. On the other hand, economic development is traditionally linked with environmental pollution and exploitation of natural resources (Bosselman, 2006: 21).

Untuk mengimbangi dampak buruk industrialisasi dan modernisasi, diperlukan upaya pelestarian alam. Upaya yang dapat dilakukan adalah penciptaan, pembenahan dan perlindungan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota, salah satunya terhadap hutan kota. Hutan kota sebagai unsur RTH merupakan subsistem

kota, sebuah ekosistem dengan sistem terbuka. Hutan kota diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan perkotaan dengan menyerap hasil negatif yang disebabkan aktivitas kota (Irwan, 2005:23). Selain itu, tujuan perlindungan hutan yakni untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Disadari bersama, fungsi hutan sangat besar pengaruhnya di dalam proses kehidupan makhluk bumi. Terutama bagi kehidupan manusia sebagai penentu kelestarian ekosistem dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Bahkan, lebih jauh kehidupan ekosistem yang diperankan di dalam kehidupan bangsa tidak lepas dari ekosistem bumi yang sangat kompleks dan maha luas (Zain, 1997: 10).

Seperti kita ketahui, keadaan lingkungan kota memang sudah teramat parah, penuh sesak dengan bangunan, sedang area hijau juga sudah makin minim jumlahnya. Pohon-pohon peneduh telah sangat jarang kita jumpai dengan alasan keberadaannya dapat mengganggu. Padahal mereka kita butuhkan sebagai penghasil oksigen. Hal lain mengenai lingkungan alam hayati adalah masih kurangnya perlindungan terhadap satwa-satwa liar, satwa langka, dan tumbuhan-tumbuhan tropis di Indonesia. Padahal berada di daerah tropis memungkinkan kita mempunyai beraneka jenis binatang dan tumbuhan. Tapi ternyata seiring waktu jumlahnya jauh semakin menurun dan bahkan beberapa diantaranya terancam punah. Kasus kematian satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) beberapa saat lalu¹ dapat menjadi gambaran agar pengelolaan area konservasi alam semacam ini dapat lebih baik.

Modenisasi juga seolah mulai mengubah orientasi dan anggapan masyarakat terhadap kriteria tempat wisata yang bagus. *Mall*, dan pusat perbelanjaan telah berubah menjadi tujuan utama rekreasi. Ini terbukti berdasarkan pengamatan dan

¹ Harian Solopos, 23 Oktober 2010, Hal.7.

interview pendahuluan pada beberapa relasi. Pertimbangan mereka, saat ini sangat sulit untuk mendapatkan tempat rekreasi alam terbuka yang layak seperti yang mereka harapkan. Hal yang menarik, sebelum krisis tahun 1998 dibutuhkan waktu 37 tahun untuk membangun pusat-pusat perbelanjaan. Namun dalam jangka waktu 10 tahun saja setelah krisis, Jakarta yang mempunyai total luas 1 juta m² justru pembangunan gedung pertokoannya bertambah seluas 2,4 juta m² menjadi 3,4 juta m² (Halim, 2008:126).

Beberapa riset internasional menunjukkan makin besarnya peran masyarakat terhadap penataan lingkungan. (Chawla and Heft, 2002, Francis and Lorenzo; 2002, Egretta and Kemp; 2002). Riset-riset tersebut menunjukkan bahwa belum tentu *public space* yang dibutuhkan masyarakat adalah berupa banyaknya gedung dan mall. Sehingga memang akan sangat bijaksana bila *policy makers* melibatkan masyarakat untuk ikut berperan dalam menata ekosistem kota. Terlebih pada RTH sebagai wahana bermain anak yang *profitable public space* maupun yang sekedar *non profitable public space*. (Ket: *profitable public space* dimaksud sebagai ruang publik yang bisa dinikmati setelah membayar secara langsung, sedang *non profitable public space*, adalah area umum yang disediakan untuk masyarakat secara gratis). Mengajak keterlibatan anak dan remaja dalam perancangan area publik tertentu bahkan dimungkinkan terhadap perancangan tata kotanya diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta kebutuhan alam hayati itu sendiri.

Mengenai salah satu kondisi ideal, dapat dicontohkan oleh Provinsi Kalimantan Timur yang berinisiatif menciptakan hutan di tengah-tengah Kota Tarakan. Hutan seluas 125 Ha tersebut diisi dengan aneka satwa khas Kalimantan seperti bekantan dan wau-wau. Bekantan dibiarkan bebas bergelayutan di area ini

karena dianggap tidak membahayakan pengunjung dengan sifatnya yang jinak, sedang wau-wau dikandangan karena memiliki sifat liar. Di hutan kota ini selain terdapat arena bermain juga disediakan perpustakaan, sehingga para pengunjung tidak hanya menikmati udara bersih dan alam lestari, namun juga pengetahuan. Dari sekian pengunjung yang di-*interview* pada acara tersebut, ada anak SD yang mengaku merasa senang berada di obyek wisata tersebut karena mendapat suasana santai sekaligus pengetahuan.²

Surakarta yang merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang padat penduduk, agaknya dapat sedikit berlega hati. Walaupun saat ini telah banyak berdiri bangunan untuk fasilitas masyarakat, kota ini masih memiliki hutan kota sebagai penyelaras. Tempat tersebut diberi nama Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), berada di ujung timur kota dan merupakan salah satu area taman terluas di kota Surakarta. Tempat ini sekaligus menjadi taman marga satwa dibawah binaan Pemerintah Kota Surakarta. Sedangkan satwa dan tanaman langka yang berada disana merupakan aset milik negara/ pemerintah pusat yang dititipkan dalam pengelolaan TSTJ.³ Kondisi geografis TSTJ yang semi hutan dan berada tepat di tepi Sungai Bengawan Solo menjadikannya objek wisata yang asri serta bersifat edukatif dan menghibur.

Sebagai salah satu "aset alam", Taman Satwa Taru Jurug wajib kita jaga dan kita pelihara. Taman/ hutan mini tersebut mempunyai peran yang sangat besar bagi lingkungan, yakni sebagai penghasil oksigen, tempat hidup berbagai jenis binatang dan tumbuhan, tempat rekreasi, dan lebih dari itu menjadi penambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun menurut riset pendahuluan ternyata keberadaan taman ini seolah makin terpinggirkan. Terbukti dengan

² Liputan Trans TV, 2 Juli 2011 pukul 11.00 WIB.

³ Ajati, Bagian Hukum dan HAM, *Wawancara Pribadi*. 21 September 2010, Pukul 09.30 WIB.

jumlah pengunjungnya yang tidak terlalu banyak bila dibandingkan secara kasat mata dengan area yang hampir sejenis di kota-kota lain seperti Gembira Loka di Jogjakarta dan Taman Safari Prigen.

Perlu dicari tahu penyebab hal diatas. Beberapa tahun lalu pengelolaan TSTJ pernah dialihkan kepada pihak swasta, tapi pada kenyataannya berdampak buruk karena terjadi beberapa satwa mati. Untuk mengatasi hal tersebut berulang, mulai tahun 2002 berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pengelola Taman Satwa Taru Jurug, direksi/ pengelola taman tersebut mendapat otonomi khusus untuk mengelola konservasi alam (terhadap satwa dan tanaman langka) di Jurug. Namun ternyata dengan otonomi yang diberikan sejak tahun 2002 tersebut belum menunjukkan hasil pengelolaan yang baik di TSTJ. Sejak adanya otonomi yang diberikan, pengelolaan terhadap TSTJ telah berganti format beberapa kali. Mulai dari yayasan, perseroan terbatas (PT), hingga yang terakhir berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-Perusahaan Daerah (Perusda).

Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, berlaku sejak diterbitkan pada awal tahun 2010 dengan pengelola sementara/ transisi. Dalam perubahan bentuk hukum ini pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Pemerintah Kota Surakarta (Tim Satgas Pemkot). Sedangkan pemerintah pusat sendiri sebagai pemegang hak terhadap keberadaan satwa dan tumbuhan di TSTJ, melakukan pengawasan secara rutin pada pengelolaan TSTJ tiap 6 (enam) bulan sekali. Pengawasan dilakukan untuk tetap melindungi keberadaannya sebagai ekosistem alam dan untuk menjaga agar tempat tersebut tidak bergeser fokusnya dari fungsinya sebagai salah satu

tempat pelestarian alam.⁴ Riset ini akan menelaah perkembangan pengelolaan atas TSTJ setelah penerapan Perda No. 6 Tahun 2010 tersebut.

Setiap ruang publik yang dibuat haruslah memperhatikan pemenuhan kriteria pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, sejak awal perencanaan kegiatan sudah diperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya kegiatan pembangunan (Zain, 1997: 15)

Apabila mengingat kasus lain pada waktu lalu dimana terdapat satwa mati akibat salah kelola yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya, banyak anggapan bahwa pengelolaan TSTJ-pun termasuk masih jauh dari ideal. Berdasarkan hasil interview, masih banyak masyarakat yang menganggap lokasi tersebut kurang menarik. Tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan berarti. Seandainya ada "keramaian" hanya bersifat temporal saja pada saat-saat tertentu seperti saat libur hari raya, libur kenaikan kelas, dan saat ada *event* budaya. Dari segi ekonomi, dapat diketahui berdasarkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran terdapat defisit sebesar Rp. 26.245.930,00 selama tahun 2010.

Setelah dikeluarkannya Perda No. 6 Tahun 2010 namun ternyata masih terdapat defisit dana, maka dilakukan perubahan baru secara total yang diawali dengan pembentukan Struktur Pengelola Baru pada bulan April 2011 yang menjadi harapan nyata bagi perbaikan TSTJ. Bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh pengelola baru untuk mengubah area ini menjadi tempat yang ideal. Namun

⁴ Op cit.

Lilik Kristiyanto yang merupakan Dirut baru TSTJ menganggap bahwa perbaikan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin walaupun bukan perkara mudah. Tentu saja dengan melibatkan pihak ketiga yakni investor, diharapkan upaya perbaikan dapat segera terealisasi.⁵ Namun hingga saat penulisan penelitian ini, diketahui bahwa dari 3 calon investor, 2 diantaranya telah mengundurkan diri sebelum tahap seleksi. Terdapat indikasi bahwa bentuk hukum Perusda menjadi salah satu kendala.⁶

Idealnya, keberadaan hutan kota TSTJ memberikan manfaat yang tinggi bagi masyarakat luas. Sehingga perlu peran serta segenap masyarakat baik yang berada di sekitar lokasi, masyarakat pengunjung serta masyarakat luas untuk mempunyai kesadaran akan pentingnya alam lestari, kepedulian terhadap aset-aset budaya, dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sebuah lokasi wisata sebagai sarana peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dari pemaparan diatas diketahui bahwa dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah, pengelola, serta masyarakat dalam upaya perbaikan TSTJ. Sebab antara manusia dan alam terdapat saling interaksi. Dimana interaksi ini menghasilkan budaya. Budaya yang muncul dari dalam masyarakat dapat kita sebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal disini lebih bersifat sebagai interaksi positif antara TSTJ dengan masyarakat. Budaya *adiluhung* warga Surakarta akan terus ada dan terjaga seiring keberadaan taman ini. *Sentiment community* muncul karena masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat dari taman tersebut. Manfaat secara langsung dapat dirasakan dalam bidang pariwisata dan lingkungan hidup. Baik oleh pengelola, pengunjung, pedagang di area taman, maupun masyarakat sekitar taman yang memperoleh

⁵ Kristiyanto, Lilik, *Wawancara Pribadi*, di lokasi TSTJ pada Jum'at, 15 Juli 2011 pukul 10.00 WIB.

⁶ Harian Solopos, *Investor TSTJ Mundur Teratur*, diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2011, Hal. 11.

benefit alam lestari. Sedangkan secara tidak langsung adalah manfaat bagi masyarakat Surakarta secara keseluruhan, misalnya dari pajak yang dibayarkan oleh TSTJ yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan daerah. Sehingga diharapkan masyarakat akan berusaha untuk mempertahankan kelestariannya agar manfaat akan terus mereka peroleh.

Pemerintah sebagai pengatur/ pembuat payung hukum dalam merancang kebijakan yang dibutuhkan. Sedangkan pengelola/ manajemen sebagai pelaksana juga harus membuat sekaligus menerapkan kebijakan yang dibuatnya dalam penataan TSTJ dengan menyesuaikan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berada di atasnya, sehingga terwujud kondisi TSTJ seperti harapan bersama.

Begitu pentingnya kebijakan yang tepat dalam pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya dalam tesis dengan judul: **“MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARIWISATA TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pandangan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan pengelolaan pariwisata Taman Satwa Taru Jurug Surakarta?
- b. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata Taman Satwa Taru Jurug Surakarta?
- c. Bagaimanakah model kedepan kebijakan pengelolaan pariwisata Taman Satwa Taru Jurug Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan pariwisata Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- b. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah model kedepan kebijakan pengelolaan pariwisata Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Objektif

Manfaat objektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengelolaan pariwisata Taman Satwa Taru Jurug Surakarta; mengetahui bagaimana implementasinya dan untuk mengetahui bagaimana model kedepan kebijakan pengelolaan pariwisata Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

2. Manfaat Subjektif

Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai Sosiologi Hukum dan Hukum Lingkungan.

E. Landasan Teori

Berbicara tentang teori sesungguhnya tidak ada definisi yang baku, namun secara umum apabila membahas teori maka kita akan dihadapkan pada dua

macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada di dalam *idea imaginative* dan padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis (Utsman, 2009: 352).

Mendasari tesis ini, selain yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 4, yang menjadi landasan teori adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam konsideran UU No. 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Dalam konsideran UU No. 9 Tahun 1990 disebutkan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan berdasarkan konsideran UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Berdasarkan beberapa peraturan perundangan diatas diketahui bahwa sangat penting untuk memperhatikan kelestarian alam demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Apalagi salah satu bentuk alam lestari berupa taman seperti yang tersebut dalam tesis ini, juga dapat berfungsi sebagai tempat wisata dan hiburan yang mempunyai banyak manfaat potensial untuk dikembangkan sehingga perlu pengelolaan yang baik.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH dan Ratih Lestarini, SH mengenai teori konflik dialektis: *“the more unequal distribution of scarce resources in a system, the more conflict of interest between dominant segments in a system.”* (1988: 66). TSTJ yang mempunyai peran ganda sebagai tempat hiburan sekaligus konservasi, rawan terhadap terjadinya konflik antar pemangku kepentingan, sehingga perlu pengelolaan.

Teori praktis dirancang untuk mengumpulkan banyak perbedaan antar situasi dan untuk memberikan sebuah susunan pemahaman yang memungkinkan peneliti mempertimbangkan rangkaian alternatif tindakan untuk mencapai tujuan (Soekanto, Lestarini, 1988: 25). Berdasarkan teori praktis tersebut, dimungkinkan untuk menghasilkan beberapa alternatif tindakan pengelolaan demi mencapai tujuan bersama.

Berkaitan dengan teori hukum, hal terpenting dalam tesis ini adalah mendasarkan hukum pada pandangan rakyat Indonesia yaitu Pancasila. Menurut Sabian Utsman dalam bukunya, dijelaskan bahwa untuk menganalisis persyaratan fungsional sosial hukum (sistem sosial hukum), Talcott Parsons meruntutnya dari tindakan sosial ke sistem sosial yang dikenal dengan kerangka AGIL, meliputi beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) *Adaptation*, yaitu fungsi adaptasi dalam hal penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.
- 2) *Goal attainment*, merupakan fungsi pencapaian sasaran atau tujuan. Parson beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya, namun perhatian yang diutamakan adalah bukan tujuan pribadi individu tapi tujuan bersama dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan.
- 3) *Integration*, merupakan fungsi integrasi, memadukan atau mengakomodasi pelbagai faktor yang terkait pencapaian tujuan yang mana terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi yang berfungsi secara menyeluruh.
- 4) *Latent patterns maintenance*, yaitu melestarikan polarisasi yang mana sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang bersangkutan.

Mengenai pentingnya pengelolaan, apabila dikaitkan dengan teori AGIL tersebut, yakni: terdapat keharusan sistem sosial menghadapi lingkungan dimana unit-unit sistem sosial saling berkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama berdasarkan nilai-nilai yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan area-area publik, diperlukan adanya sikap yang bijaksana dari semua pihak agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan di satu sisi sehingga mengorbankan sisi yang lain. Perlu diwujudkan adanya keadilan pengelolaan dan hasil-hasilnya. Seperti yang dikemukakan Aristoteles, bahwa keadilan komutatif (*commutative justice*) adalah pertukaran kebaikan (nilai-nilai, keuntungan) yang dapat diterima dan tidak terpaksa, dikontraskan dengan manipulasi, ataupun eksploitasi yang berlebihan.

Meninjau sisi pariwisata, terdapat beberapa teori sebagai berikut (Intosh, 1986: 9-10):

- 1) *Institutional approach*/ pendekatan institusional, mempertimbangkan berbagai institusi yang menyajikan aktivitas pariwisata, misalnya agen pariwisata. Metode ini membutuhkan investigasi organisasi, metode operasi, permasalahan pariwisata, biaya, dan tempat-tempat wisata, pembelian jasa penerbangan, perusahaan sewa mobil, hotel, dan lain sebagainya.
- 2) *Product approach*/ pendekatan produk, pendekatan ini melibatkan studi tentang berbagai produk pariwisata, bagaimana mereka diproduksi, dipasarkan, dan dikonsumsi.
- 3) *Historical approach*/ pendekatan historis, melibatkan analisa aktivitas pariwisata dan institusi dari sudut perkembangan pariwisata. Mencari inovasi, mencari sebab pertumbuhan atau penurunan wisata, atau minat wisata.
- 4) *Managerial approach*/ pendekatan manajerial, merupakan orientasi perusahaan secara mikroekonomi, berfokus pada aktivitas manajemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnis wisata, seperti perencanaan, riset, penentuan harga, iklan, pengendalian dan lain sebagainya. Pendekatan ini yang paling populer, dan tidak mengesampingkan unsur lain yang dianggap berguna.
- 5) *Economic approach*/ pendekatan ekonomis, pendekatan ini berguna sebagai kerangka dalam menganalisa kepariwisataan dan kontribusinya bagi perekonomian negara dan perkembangan perekonomian negara.

- 6) *Sociological approach*/ pendekatan sosiologis. Karena pariwisata cenderung merupakan aktivitas sosial, hal ini menarik perhatian para ahli sosiologi untuk mempelajari perilaku pariwisata dalam individu dan kelompok, serta dampak pariwisata dalam masyarakat.
- 7) *Geographical approach*/ pendekatan geografis. Para ahli geografis beserta ilmu temuannya menjadi sangat penting dalam perkembangan pariwisata berkaitan dengan temuan daerah wisata, bagaimana kondisi geografisnya, yang berdampak bagi bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.
- 8) *Interdisciplinary approaches*/ pendekatan interdisiplin. Beberapa disiplin ilmu menjadi saling berkaitan karena pariwisata meliputi banyak hal yang kompleks dan saling berhubungan. Sehingga penting untuk membuat beberapa pendekatan untuk mempelajari pariwisata.
- 9) *The system approach*/ pendekatan sistem, mengintegrasikan pendekatan-pendekatan lain dalam satu metode yang komprehensif yang berhubungan dengan faktor mikro dan makro. Pendekatan ini dapat menguji lingkungan persaingan perusahaan pariwisata, pasarnya, hasilnya, dan pertaliannya dengan institusi lain. Pendekatan sistem dapat meninjau dari sudut pandang makro dan menguji sistem pariwisata secara keseluruhan dalam suatu negara, daerah, atau area dan bagaimana hal itu berhubungan dengan sistem yang lain seperti hukum, politik, ekonomi, dan sistem sosial.

Beberapa pendekatan teori pariwisata diatas bersifat umum menyeluruh, dapat diaplikasikan secara bertahap maupun serempak, parsial maupun keseluruhan, yang kesemuanya merupakan bagian-bagian penting dalam mengembangkan pariwisata.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim (Soekanto, 2006: 42).

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini menggali kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta dan pihak Manajemen/ pengelola TSTJ; menelusuri seluruh ketentuan perundang-undangan yang digunakan dalam menata dan mengelola TSTJ; menggali kendala-kendala pengelolaan, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen TSTJ dalam mewujudkan visi dan misinya.

2. Penelitian Terdahulu dan Originalitas

Berikut hasil pelacakan dan kajian yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, yakni penelitian berupa skripsi milik Victory Prakoso (2007) berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Tugas Taman Satwa Taru Jurug dalam Usaha Mengembangkan Salah Satu Aset Pariwisata di Kota Solo". Penelitian ini menguraikan tentang proses Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2006 yang meliputi dua tahapan penting yaitu tahap awal maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan walikota nomor 7 tahun 2006, dan tahap terakhir tugas satuan. Mengenai tugas satuan ada dua bentuk yaitu

tugas pokok dan tugas satuan unit dalam mempersiapkan konsep peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam pelaksanaannya, maksud dan tujuan serta tugas satuan baik tugas pokok ataupun tugas dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang BUMD tidak semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Dimana peraturan tersebut dilaksanakan dengan tidak benar karena sifat pemimpin yang arogan, dalam pelaksanaannya tidak melalui proses studi kelayakan sehingga tidak terbit naskah akademik, belum adanya suatu produk hukum yang menjelaskan secara spesifik mengenai bentuk perusahaan daerah, disamping karena masalah sumber daya manusia. Adapun usaha untuk mengatasi permasalahan yang timbul yaitu dengan melakukan revisi terhadap struktur organisasi yang telah ada, perlu diterbitkannya naskah akademik melalui studi kelayakan, menetapkan suatu peraturan yang paling sesuai untuk diterapkan dan dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional dan manajemen yang handal dibidangnya dan diberi bekal pembinaan terlebih dahulu sebelum diterjunkan langsung kelapangan. Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya perubahan dalam sistem pelaksanaan peraturan walikota Nomor 7 Tahun 2006 ke arah pembentukan BUMD, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan pembentukan taman Jurug menjadi suatu Badan Usaha Milik Daerah.

Penelitian lain yang berkaitan dengan adanya proses revitalisasi adalah dalam skripsi Dita Andini (2011) mengenai “Revitalisasi Obyek Wisata Taman Balekambang Surakarta”. Mengingat bahwa salah satu kebijakan

dan program Pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya dan Pariwisata, perlu dilakukan pemberdayaan potensi wisata dan budaya melalui revitalisasi obyek wisata Taman Balekambang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses revitalisasi, mengetahui hambatan dan kemudahan di dalam proses revitalisasi di Taman Balekambang. Hasil penelitiannya adalah : 1) Proses revitalisasi Taman Balekambang dilaksanakan sesuai dengan skenario penyusunan. Namun tidak semua bangunan yang direncanakan dibangun pada Taman Balekambang, menyesuaikan dengan kondisi Taman Balekambang dan anggaran yang ada; 2) Operasionalisasi Taman Balekambang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta; 3) Revitalisasi Taman Balekambang menjadi ruang terbuka hijau bagi Kota Surakarta dan berhasil mengembalikan citra Taman Balekambang sebagai Taman Rekreasi Budaya.

Sedangkan penelitian lain yang berkaitan dengan obyek wisata TSTJ adalah penelitian Endang Sulistyorini (2005) dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Faktor-Faktor yang Menjadi Daya Tarik Obyek Wisata Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dengan Menggunakan Metode *Quality Function Development* (QFD)”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ada 16 atribut/kebutuhan konsumen yang pengunjung inginkan untuk diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya di TSTJ. Dari ke-16 atribut tersebut yang menjadi prioritas utama perbaikan adalah keanekaragaman dan kelengkapan koleksi satwa langka, kondisi fisik bangunan, jalan yang terawat, bersih dan bagus, kondisi satwa yang sehat dan terawat, tempat

parkir yang memadai dan aman, papan nama satwa tercantum dengan jelas.

Berdasarkan pelacakan hasil penelitian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan mempunyai originalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yakni bahwa mengenai model kebijakan pengelolaan pariwisata atas TSTJ belum pernah diteliti oleh peneliti manapun. Bobot originalitas penelitian ini terletak pada perancangan model kedepan terhadap kebijakan pengelolaan pariwisata TSTJ dalam rangka perwujudan visi dan misi Kota Surakarta sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisa kebijakan pengelolaan pariwisata yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Manajemen perusahaan sendiri terhadap TSTJ.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Pemerintah Kota Surakarta dan di Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

5. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis di Kantor Pemkot Surakarta bagian Hukum dan HAM, pihak Manajemen/ pengelola Taman Satwa Taru Jurug, serta dari beberapa kalangan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. UUD 1945
- b. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya;
- c. UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
- d. Perda Surakarta No. 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- e. Keputusan Walikota Surakarta No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pengelola Taman Satwa Taru Jurug;
- f. Perda Surakarta No.2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- g. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
- h. Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusda TSTJ Surakarta.

2) Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan kebijakan pengelolaan terhadap TSTJ Surakarta.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

A. Studi kepustakaan

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan dasar penyusunan penelitian hukum ini.

B. Studi Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dengan informan yaitu Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Surakarta, dan Manajemen / Pengelola Taman Satwa Taru Jurug, serta pada beberapa kalangan masyarakat.

7. Metode Analisis Data

Dalam riset ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat dari para sarjana untuk mendapatkan kesimpulan secara yuridis.

8. Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan sampel *non-random sampling* berupa *purposive sampling*, yaitu pemilihan elemen sampel dengan sengaja.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antar bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari penelitian ini yang meliputi: tinjauan umum tentang hukum lingkungan, tinjauan umum tentang sosiologi hukum, tinjauan umum tentang ekosistem dan konservasi alam, dan tinjauan umum tentang pariwisata.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan pariwisata TSTJ. Bab ini berisi tentang bagaimana kebijakan pengelolaan TSTJ; bagaimana implementasinya; dan bagaimana model kedepan kebijakan pengelolaan pariwisata atas TSTJ.

Bab IV adalah penutup, dimana berisi kesimpulan dari uraian penelitian pada bab-bab sebelumnya, dilengkapi dengan saran-saran.